

SKRIPSI



TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERCRIME DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2012-2014)

OLEH

**FIKA FAIZAH N. F
B 111 11 347**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
CYBERCRIME DI KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus Tahun 2012-2014)

OLEH:

FIKA FAIZAH N. F

B11111 347

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERCRIME DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus 2012 - 2014)

Disusun dan diajukan oleh:

FIKA FAIZAH N. F

B111 11 347

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 21 Mei 2015
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



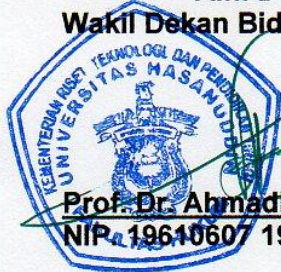
Prof. Dr. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19640607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : FIKA FAIZAH N. F

Nomor Pokok : B111 11 347

Bagian : Hukum Pidana

**Judul : Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana
Cybercrime di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun
2012-2014)**

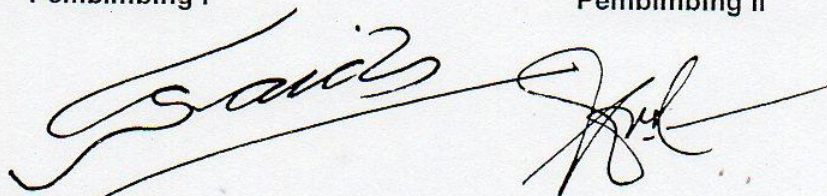
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2015

Mengetahui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 1962 0711 1987 031 001

Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H
NIP. 1963 1024 1989 031 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **FIKA FAIZAH N. P.**
No. Pokok : B111 11 347
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis terhadap Tindak Pidana
Cybercrime di Kota Makassar (Studi Kasus 2012-2014)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Angadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 196106011986011003

ABSTRAK

FIKA FAIZAH N. F (B111 11 347). Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana *Cybercrime* di Kota Makassar. Di bawah bimbingan Muh. Said Karim selaku pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya tindak pidana *cybercrime* dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana *cybercrime* di Kota Makassar.

Penelitian ini metode penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai pihak kepolisian dan korban tindak pidana *cybercrime*. Penulis melakukan penelitian dengan cara mengambil data korban pelapor tindak pidana *cybercrime* di Polrestabes Makassar dan Polda Sulselbar Ditreskrimsus *Cybercrime* serta mewawancarai Kasubdit I Idik III dan Kanit 4 Subdit 2 *Cybercrime*. Penulis juga melakukan wawancara bersama dengan korban tindak pidana *cybercrime* berkenaan dengan kronologi kasus sehingga dapat menjadi korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perkembangan dari tahun ke tahun berkaitan dengan tindak pidana *cybercrime*. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari hubungan tidak harmonis antara korban terhadap keluarga/teman/relasi dan juga pengetahuan korban akan teknologi informasi yang digunakan oleh korban serta sikap lalai yang dimiliki oleh korban sehingga menjadi ikut bertanggungjawab dalam terjadinya tindak pidana *cybercrime*. Aparat kepolisian menerapkan upaya preventif untuk mencegah kejahatan semakin berkembang dan upaya represif untuk memberi efek jera kepada pelaku serta menghimbau masyarakat agar berpartisipasi dalam mencegah dan juga mengungkap kasus-kasus *cybercrime*.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah atas segala nikmat, berkah, rahmat, taufik, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Subhanahuwata'ala* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Shallallahu'alaihiwa sallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Skripsi ini merupakan tugas akhir demi memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul skripsi **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana *Cybercrime* di Kota Makassar (Studi Kasus 2012-2014)”**. terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak selama penulis menempuh pendidikan, penelitian serta penulisan skripsi ini baik secara materiil dan imateriil.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada **Ayahanda, H. Drs. Muh. Natsir Kadir, M.Si., Ak., CA** dan **Ibunda Hj. Dra St. Rusmini Malik** yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga penulis, menasehati, dan

terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kebaikan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Terspesial penulis ucapkan terima kasih kepada **Saudaraku Muh. Fiqry Noeralif Putra, Andi Nurul Arifah, Farah Nurul Inayah, dan Muh. Fadhlán Noerafdal Putra** yang selalu memberikan semangat dan do'a serta bantuan moril maupun materil kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk saat ini hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasamu akan di nilai oleh Allah Swt dan semoga selalu mendapatkan ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi saudara yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan penulis dalam segala hal apapun.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dan Jajaranya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Said Karim, S.H., M.H., M.Si dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Penulis. Terima kasih atas bimbinganya semoga suatu saat nanti penulis dapat membalas jasa yang telah kalian berikan. Semoga ilmu yang kalian berikan dapat berberkah.
8. Bapak Abdul Asis, S.H., M.H, Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hijrah Ahdiyanti,S.H.,M.H., Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. terima kasih atas kesediaanya sebagai penguji dan penguji pengganti yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.,selaku Penasihat Akademik (PA) Penulis. Terima kasih atas kebaikan serta kesedianya setiap kali Penulis berkonsultasi kartu rencana studi (KRS).
10. Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu, yaitu Bapak/Ibu Dosen pada bagian Hukum Acara, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Hukum Perdata, dan Hukum Internsional terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, kalian adalah Dosen yang selalu memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
11. Terima Kasih Kepada Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan keramahannya “melayani” segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir.
12. Terima Kasih Kepada Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas. dan Perpustakaan Pusat Unhas. Terima kasih telah

memberi waktu dan tempat selama penelitian yang berlangsung kurang lebih dua bulan lamanya dengan menjajal literatur sebagai penunjang skripsi Penulis.

13. Kepada Kepolisian Resor Kota Makassar dan Kepolisian Daerah Sulsebar Unit *Cybercrime* beserta staff dan jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.
14. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat (Gelisah), Dian Aggraeni Suciarti, Wahda Ningsi, lin Saputry, Atifatul Ismi, Indo Padang, Andi Dettia Ati Cawa, Nursakinah, Helvi Handayani, Virginia Christina, Isma, Sarah, Nita Kurniawati, Rida Ariyani Putri Samal, Suci Febrianti, Rifka Juliani, Putri Juwita Permatahati, Alkisa dwi Septiani, Nurfitriani Khairunnisa, Andi Hidayat Nur Putra, Maulana Arif Nur, Afdal Hidayat, Dhian Fadhlhan Hidayat, Ahmad dan adikku yang paling perkasa Jusniati. Terima Kasih atas kebersamaannya, bantuannya kebahagiaan yang tak bias diukur dengan apapun. Tanpa kalian di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serasa luar angkasa. Semoga kita dapat membangun mimpi kita dan semoga ilmu kita dapat bermanfaat dan membawa berkah. Aamiin
15. Terima Kasih kepada Asian Law Students' Association (ALSA), sebagai organisasi tempat penulis untuk mendapatkan ilmu, pengalaman, keluarga, yang selalu memberikan kebahagiaan bagi penulis. Semoga ALSA semakin maju dan tetap *Always Be One*.
16. Terima Kasih kepada Ayu Alifiandri, Rahmatullah Susanto, Budi Setiawan, Syahrul, Arham dan teman-teman di Departemen Public Relation and Information ALSA LC UNHAS Periode 2012-2013 atas kerja sama dan ilmunya selama penulis berkreatifitas di organisasi.

17. Terima Kasih Kepada Pengurus ALSA LC UNHAS Periode 2012/2013, saudara- saudari penulis yang telah mengajarkan banyak hal dalam keorganisasian.
18. Terima kasih kepada kanda-kanda yang selalu membagi ilmunya kepada penulis, kanda Muchtadin Al- Attas, S.H, , Kanda Ridwan Saleh S.H, kanda Zulkifli Muchtar, S.H, kanda Navira Araya Tueka, S.H, kanda Dewiyanti Ratnasari, S.H, kanda Zakiah, S.H, dan kanda Irfan Marhaban, S.H
19. Tim Moot Court Competition (MCC) Piala Mahkamah Agung 2013. Terima kasih Kepada kak Fadil, kak Zaldi, kak Anto, kak Nursal, kak Zul, Kak Ridwan, Kak Jumardi, Kak Adi, Kak Tadin, Kak Nurmi, Dayat, Molen, Rini, Adini, Bunda Tari, Anggi, Nita, lin, Lisa, Oji, dan Rudi yang telah mengajarkan Penulis arti ilmu MCC, persaudaraan dan segala apa yang penulis lewati bersama kalian banyak manfaat yang penulis ambil Win!Win!Win!Champion!
20. Teman-teman bebehku tercinta Nurul Fitrah Risyahputri, Dewi Evandari, Nurwahyu Saputri, Risky Hardianti, Indah Lestari SM, dan Reny Ritawati .Terima kasih kalian sudah menjadi saudara dan bagian hidup penulis. Juga kepada Mustaqin Ishak terima kasih atas semangat dan dedikasinya menemani penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk saat ini hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis ucapkan, semoga ilmu kita dapat berberkah.
21. Teman-teman Angkatan 2011 (MEDIASI) FH-UH, terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan. Tidak terasa kebersamaan kita di FH-UH berakhir, semua hanya terjawab oleh waktu saja. Sukses selalu untuk kita semua.
22. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 87 Unhas, khusus untuk Posko Desa Congko, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone

Harimurty Rusli, kak Ibnu Mundzir, Vika Velika Hakim, Hardiyanti, Harlinah Hasanuddin, Friske Tuli, dan Putri Nadia Soharinal serta Para Sahabat Congko (Congkoers) di Posko Desa Cempniga, Posko Desa Bacu (kak Angga) dan Posko Desa Cingkang. Terima kasih atas kerja samanya selama KKN. Kebaikan, keseruan dan bantuan kalian akan selalu Penulis ingat. Semoga kita selalu bersama sebagai saudara dan ilmu kita dapat berberkah.

23. Terima kasih kepada Alexander “amrazing” Thian, yang telah memotivasi penulis dan juga terima kasih atas semangatnya kepada Playlist milik penulis, tanpa kalian Penulis bagaikan Dora tanpa peta.
24. Serta seluruh sahabat dan teman yang tidak dapat Penulis tuliskan namanya satu per satu terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang seharusnya ada perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu kritikan dan sarat yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Makassar, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Viktimologi	10
1. Pengertian Viktimologi	10
2. Ruang Lingkup Viktimologi	13
3. Manfaat Viktimologi.....	16
B. Korban	19
1. Pengertian Korban	19
2. Tipologi Korban	20
C. Kejahatan	24
D. <i>Cybercrime</i>	33
1. Pengertian <i>Cybercrime</i>	33
2. Bentuk-Bentuk <i>Cybercrime</i>	37
3. Ketentuan Hukum dalam <i>Cybercrime</i>	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	47
B. Jenis dan Sumber Data	47
C. Jenis Pengumpulan Data	48
D. Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Korban dalam Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> di Kota Makassar . .	50
1. Perkembangan Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> di Kota Makassar.....	50
2. Peran Korban dalam Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> di Kota Makassar.....	55
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> di Kota Makassar	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> yang Dilaporkan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2012-2014.....	51
Tabel 2. Jumlah Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> yang Terjadi di Kota Makassar yang Dilaporkan di Wilayah Hukum Polda Sulsebar Ditreskrimsus <i>Cybercrime</i> Tahun 2012-2014.....	52
Tabel 3. Peranan Korban Terhadap Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> yang Terjadi di Kota Makassar Tahun 2012-2014	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Internet yang semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Dampak yang bersifat positif karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi Internet membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan risiko tertangkap yang sangat kecil oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara disamping menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior*. Kekhawatiran terhadap ancaman (*threat*) *cybercrime* telah terungkap dalam makalah *Cybercrime* yang disampaikan dalam ITAC (*Information Technology Association of Canada*) pada *International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium Congress* di Quebec pada

tanggal 19 September 2000, yang menyatakan bahwa *cybercrime is a real growing threat to economic and social development aspect of human life and so can electronically enabled crime*¹.

Kejahatan ini merupakan tindak kejahatan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual dengan melibatkan pengguna internet sebagai korbannya. Kejahatan tersebut seperti misalnya manipulasi data (*the trojan horse*), spionase, *hacking*, penipuan kartu kredit online (*carding*), merusak sistem (*cracking*), dan berbagai macam lainnya. Pelaku *cybercrime* ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas.

Dewasa ini kita dapat melihat bahwa hampir seluruh kegiatan manusia mengandalkan teknologi yang menghadirkan kemudahan bagi penggunaanya berupa akses bebas yang dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun tanpa sensor serta ditunjang dengan berbagai penawaran internet murah dari penyedia jasa layanan internet. Kemudahan yang ditawarkan oleh aktivitas siber itu sendiri contohnya ketika melakukan jual-beli barang atau jasa tidak memerlukan lagi waktu yang lama untuk bertemu langsung dengan penjual atau pembelinya, sehingga waktu yang digunakan lebih cepat.

¹ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

Indonesia telah menggeser kedudukan Ukraina sebagai pemegang presentasi tertinggi terhadap *cybercrime*. Data tersebut berasal dari penelitian Verisgin, perusahaan yang memberikan pelayanan intelejen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika Serikat. Hal ini juga ditegaskan oleh Staf Ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah bahwa jumlah *cybercrime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit, penipuan perbankan, judi *online*, terorisme dan lain-lainnya.²

Memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi gaya hidup masyarakat kita, akan tetapi penggunaan teknologi tersebut tidak didukung dengan pengetahuan untuk menggunakannya dengan baik. Hasil Lembaga Riset Telematika Sharing Vision menempatkan Tahun 2013 Indonesia menjadi negara urutan pertama target kejahatan dunia maya. Hasil riset itu menyebutkan selama Tahun 2013 ada 42 ribu serangan *cyber* saban harinya. Dimitri Mahayana dalam seminar 'Indonesia Cyber Crime Summit 2014' di ITB menyebutkan bahwa saat ini masyarakat Indonesia menduduki peringkat pertama dunia dengan persentase sebesar 23,54 persen sebagai pengguna internet terbesar.³

Tidak terkecuali kota Makassar yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terus-menerus mengalami perkembangan. Gaya hidup yang terjadi di perkotaan berbeda dengan di pedesaan. Masyarakat kota

² Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 17.

³ <http://www.merdeka.com/peristiwa/hasil-riset-tahun-2013-indonesia-target-utama-kejahatan-cyber.html>, diakses pada 17 Oktober 2014.

lebih cenderung memanfaatkan segala kemudahan yang ditawarkan salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi dengan cara yang positif tentu tujuan dari kehadiran teknologi akan terpenuhi, tetapi jika pemanfaatan dilakukan dengan cara negatif akan mendatangkan kerugian bagi pelakunya.

Pemanfaatan teknologi juga harus sejalan dengan pengetahuan seseorang akan teknologi yang dimanfaatkannya, jika tidak, selain akan menimbulkan kerugian seperti kasus yang terjadi di kota Makassar dimana pelaku menipu korbannya melalui nama domain⁴ yang mengiklankan lowongan pekerjaan penerimaan karyawan pada PT Adaro Indonesia. Korban kemudian mengirimkan CV ke email hdr.adaro@gmail.com, pelaku lalu membalas email tersebut berupa surat panggilan seleksi yang dibuat seakan-akan benar berasal dari PT Adaro Indonesia. Korban kemudian diarahkan untuk mengirimkan konfirmasi kehadiran dan melakukan pemesanan tiket dari travel yang ditentukan oleh pelaku. Korban kemudian menghubungi kontak travel yang diberikan pelaku dan diarahkan untuk mentransfer sebesar 2 (dua) juta rupiah. Korban pun mentransfer sejumlah uang tersebut. Korban selanjutnya mengkonfirmasi hasil transfer, namun beberapa hari tiket tidak

⁴Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Lihat pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

kunjung diterima oleh korban dan nomor yang diberikan sebelumnya oleh pelaku sudah tidak bisa dihubungi.⁵

Kejahatan-kejahatan tersebut hadir di tengah-tengah masyarakat karena adanya kesempatan yang diberikan oleh korban. Hampir semua pengguna internet tidak mengetahui bagaimana cara untuk melindungi data ataupun bertransaksi *online* secara aman atau *safety* serta hanya dengan landasan kepercayaan transaksi-transaksi tersebut dilakukan karena kesemuanya terjadi secara virtual. Kesempatan ini lah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan menanggung kerugian karena kejahatan, baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan.⁶ Kerugian baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan bernilai sangat besar dan dalam waktu yang relatif singkat bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional yang lebih mudah dilokalisasi. Sehingga diperlukan upaya penanggulangan bagi

⁵<http://beritakotaonline.com/5265/lagi-polisi-ungkap-kasus-cyber-crime-di-makassar/>
diakses pada 21 Oktober 2014

⁶Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

kejahatan teknologi informasi ini baik upaya pencegahan kejahatan secara preventif maupun penanggulangan kejahatan secara represif.

Kekhawatiran mengenai ancaman *cybercrime* juga telah dibahas dalam kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada Kongres VIII/1990 di Havana dan Kongres X/2000 di Wina. Demikian pula dalam makalah *Cyber Crime* yang disampaikan oleh ITAC (*Information Technology Association of Canada*) pada *Internasional Industry Congress (IIIC) 2000*⁷, dimana keduanya menyerukan mengenai pola pencegahan terhadap *cybercrime* dengan sarana penal maupun non-penal.

Kehadiran hukum pidana sangat diperlukan agar dapat mengatasi *cybercrime* yang semakin berkembang. Upaya penanggulangan tersebut sewajarnya menjadi jaminan bagi pengguna internet agar dapat melakukan aktivitas *cyber* dengan nyaman dan aman serta diharapkan kepada seluruh masyarakat dapat turut aktif.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja⁸, hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan pembangunan secara menyeluruh.

Teknologi informasi seharusnya memberikan manfaat dan kesejahteraan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, maka dengan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 2

⁸ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 99

konsepsi tersebut pemanfaatan teknologi informasi harus berdasarkan pada asas-asas yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Selanjutnya pada Pasal 15 menyatakan :

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaanmemaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap *Cybercrime* di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2014)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dalam memudahkan penelitian ini, Penulis akan memberikan batasan penilaian dengan menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan korban sehingga terjadi *cybercrime* di Kota Makassar?

2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi adanya korban *cybercrime* di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan korban sehingga terjadi *cybercrime* di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi adanya korban *cybercrime* di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.
2. Secara praktiknya hasil penelitian ini dapat digunakan :
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi.
 - b. Memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).

c. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

Upaya penanggulangan kejahatan sebaiknya tidak hanya terfokus pada hal-hal atau faktor pendorong terjadinya kejahatan oleh pelaku serta metode apa yang efektif diterapkan dalam penanggulangan kejahatan. Namun, juga harus melihat pada berbagai hal yang mendorong terjadinya kejahatan oleh pihak korban. Hal ini dikarenakan, ketika terjadi suatu kejahatan maka tidak terlepas dari adanya korban sebagai tujuan utama atau pemicu munculnya kejahatan.

Kejahatan bila dipandang dari kacamata Viktimologi maka unsur-unsurnya tidak hanya meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis dan kriminologis tetapi lebih luas lagi yakni meliputi korban dan segala aspeknya, seperti: siapa itu korban, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya korban kejahatan, dan ganti kerugian .

1. Pengertian Viktimologi

Menurut Ahli hukum yang mengutip pendapat Schafer ⁹ menyatakan bahwa perkembangan perhatian terhadap korban atau *victim* telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian terhadap korban kejahatan ini

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* , PT Eresco, Bandung, 1992, hlm 7.

kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan *victimology*.

Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁰

Menurut Arief Gosita¹¹, pengertian Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:¹²

- 1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- 2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
- 3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka proses viktimisasi

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 34.

¹¹ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 40

¹² *Ibid.*, hlm. 40

dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.¹³

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi) tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat memengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa pengembangan viktimologi adalah suatu interaksi akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Salah satu faktor utama pendukung utama yang mempengaruhi kuat pengembangan viktimologi di suatu negara, adalah pandangan hidup tertentu negara tersebut. Antara pandangan hidup dengan viktimologi diharapkan adanya keserasian dan keselarasan sehingga konsep-konsep yang ada dalam viktimologi dapat diterima oleh sebab dapat bermanfaat untuk pelaksanaan pandangan hidup dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pandangan hidup tersebut.¹⁵

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi

¹³ *Ibid.*, hlm. 208

¹⁴ Made Darma Wede, 1995, Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam

Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, hlm. 200.

¹⁵ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm 29

meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.¹⁶

Viktimologi memberikan pengertian mengenai korban berikut keterikatannya dengan suatu perbuatan menurut hukum yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada korban mengenai peran dan bahaya yang dihadapi sehingga dapat meringankan penderitaannya serta bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangannya berikut ganti kerugian.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.¹⁷

Objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arief Gosita, adalah sebagai berikut¹⁸ :

- 1) Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalisasi;
- 2) Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;

¹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.44-45

¹⁷ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 50-51.

¹⁸ Arief Gosita, *Op.Cit.*, hlm.39

- 3) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti: para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya;
- 4) Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- 5) Respons suatu viktimisasi kriminal; argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tidak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;
- 6) Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup Viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban, yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

Namun dalam perkembangannya di tahun 1985, dipelopori oleh Separovic yang memelopori pemikiran agar Viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam di luar kemauan manusia (*out of man's will*).²⁰

¹⁹ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm 45.

²⁰ Muladi, Makalah: "HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana", dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 109

Sehubungan dengan itu, Paul Separovic (1985) menulis bahwa perhatian utama viktimologi pada awalnya mengkaji hubungan pelaku kejahatan dan korbannya (criminal-victim relationship), dan itu menurutnya kajian yang terlalu sempit, sebab ruang lingkup viktimologi mempunyai implikasi yang lebih luas daripada hanya sekedar criminal-victim relationship. Separovic merumuskan bahwa viktimologi dalam pengertian yang lebih luas meliputi keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban dalam arti umum. Dengan dasar itu, maka viktimologi itu menurut Separovic mempunyai tiga tugas, yaitu :²¹

1. Mengalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah korban (*to analyze the manifold aspects of the victim's problems*);
2. Menjelaskan sebab-sebab viktimisasi (*to explain the cause for vicimization*);
3. mengembangkan sistem tindakan bagi pengurangan penderitaan manusia (*to develop a system of measures for reducing human suffering*).

Ruang lingkup perhatian atau objek studi Viktimologi dan Kriminologi dapat dikatakan adalah sama. Yang berbeda adalah titik total pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal. Yaitu,

²¹ M. Arief Amrullah, Makalah: "Perkembangan Studi Tentang Korban dan Kedudukannya Dalam Hukum Pidana Positif", hlm. 4 dikutip dari http://library.unej.ac.id/client/en_US/default/search/asset/632?dt=list diakses pada 11 Oktober 2014.

Viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan Kriminologi dari sudut pihak pelaku.²²

3. Manfaat Viktimologi

Viktimologi sebagai suatu ilmu pengetahuan sudah selayaknya memberikan manfaat baik bersifat praktis maupun teoritis. Apabila suatu ilmu tidak dapat memberikan suatu manfaat maka ilmu tersebut akan menjadi sia-sia. Ilmu pengetahuan akan bermanfaat jika dapat digunakan serta dikembangkan dan dengan dipelajarinya viktimologi diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Arif Gosita²³, merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:

1. Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimasi dan proses viktimisasi;
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (*eulogize*) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain;
3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai

²² Arif Gosita, Op. Cit., hlm. 41

²³ *Ibid.*, hlm.41-43.

bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural.

4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya : efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industry, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri;
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu²⁴ :

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;

²⁴ Lilik Mulyadi, 2003, *Kapita Setekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djamban, Denpasar, hlm.120.

2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat dari Viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dan dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.²⁵

Lebih spesifik lagi menurut Soerjono Koesoemo²⁶ memberikan gambaran manfaat bagi pihak penegak hukum, sebagai berikut ;

“Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi Kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban

²⁵ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 74 dikutip dari Tarmidi, Makalah: “Pengantar Viktimologi”, hlm. 9

²⁶ Soerjono Koesoemo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum : Indonesia Menunggu Kelahiran (Kembali) Hakim Yang Besar*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1991 dikutip dari <https://www.scribd.com/doc/102079534/VIKTIMOLOGI> diakses pada 11 Oktober 2014.

terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim.

B. Korban

1. Pengertian Korban

Pentingnya definisi korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh definisi tersebut sehingga diperoleh kesamaan secara pandang.

Menurut Arif Gosita²⁷, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Pengertian korban termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana

Berdasarkan ketentuan angka I dalam *United Nations Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*,

²⁷ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 63

pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Deklarasi Nomor A/Res/40/34 tahun 1985, korban dijelaskan sebagai :
“Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment or their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power” (Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan).

2. Tipologi Korban

Tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu :

1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzal Abdel Fattah yang dikutip oleh Lilik Mulyadi²⁸ menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu :

- a. *Non participating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;

²⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 124

- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
 - c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
 - d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
 - e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk, yakni sebagai berikut :
- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
 - b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
 - c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.

Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;

- d. *Biologically weak* victim adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Selain pengelompokan di atas, masih ada pengelompokan tipologi korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut²⁹ :

- a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba;
- e. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut³⁰ :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan

²⁹ Dikdik dan Elisatris Gultom, Op. Cit., hlm. 49.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

kejahatan Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban

- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

C. Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melekat pada diri manusia . Kata Kriminal itu berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan jahat, yang mengingkari fitrah kemanusiaan. Setiap perbuatan atau tindakan merusak, mempengaruhi atau merubah sistem dalam arti luas, melanggar norma-norma yang disepakati untuk ditaati, adalah jahat. Dengan demikian kejahatan dapat merugikan masyarakat.

Pengertian kejahatan dapat ditinjau atas dua sudut pandangan yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh A. S. Alam³¹ :

Pertama, batasan kejahatan dari sudut pandangan hukum (*a crime from the legal point of view*) adalah segala tingkah laku yang melanggar hukum pidana, sedangkan kejahatan dari pandangan masyarakat (*a crime from the social point of view*) adalah setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dan berlaku di dalam masyarakat.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah : setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat:

Kejahatan menurut Hukum Pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melakukan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. Atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut. Kemudian Utrecht mengatakan peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan dalam arti yuridis yang diartikan sebagai sebuah peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.³²

Menurut Sutherland, untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah³³ :

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*);

³¹ A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 15

³² Dikdik dan Elisatris Gultom, Op. Cit., hlm. 86-87.

³³ A. S. Alam, Op. Cit., hlm. 17

- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan;
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana artinya ada beberapa proses yang harus dilalui. Selain kajian yang mendalam mengenai perbuatan itu dari sudut kriminologi, maka harus dipertimbangkan pula beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, tujuan hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara saran dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan kajian pertimbangan strategi yang mendalam mengenai kriminalisasi tersebut berupa kebijakan/politik kriminal.

Untuk melihat apa sebabnya seorang menjadi jahat, haruslah dilihat pertama-tama keadaan masa lampauanya, bagaimana pengaruh masa lampau terhadap orang itu, lalu bagaimana perkembangan kehidupan orang tersebut sampai saat melakukan kejahatan kenakalan anak-anak, belum tentu dewasanya ia menjadi penjahat, mungkin ia menjadi orang yang baik.³⁴

³⁴ Dikdik dan Elisatris Gultom, Op. Cit., hlm. 93.

Kejahatan atau sifat jahat bukanlah pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat. Sedangkan pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda-beda yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri. Keadaan ekonomi juga mempengaruhi kejahatan. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang miskin, kurangnya pendidikan, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial, ekonomi dan politik yang tinggi.³⁵

Terdapat 3 (tiga) teori yang dikemukakan oleh A.S. Alam sebagai penyebab terjadinya kejahatan, yaitu³⁶:

1. Teori Labeling

Howard berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:

- a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.
- b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Schrag, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:

- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.

³⁵ Ibid., hlm. 93

³⁶ A. S. Alam, *Op. Cit.*, hlm. 59-61

- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- c. Seorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa.
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik, tidak berarti mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal.
- e. Tindakan penangkapan adalah awal dari proses labeling.
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

2. Teori Konflik (*Conflict Theory*).

Perspektif konflik meliputi beberapa variasi sebagai berikut³⁷ :

a. Teori asosiasi terkoordinir secara inperaktif (keharusan).

Ralf Dahrendorf merumuskan kembali teori Marxis mengenai konflik kelas yang lebih pluralistik, di mana banyak kelompok bersaing untuk kekuatan, pengaruh, dan dominasi. Konsepnya mengenai “asosiasi terkoordinir” dengan keharusan menganut bahwa kontrol sosial dalam suatu masyarakat tergantung kepada hubungan bertingkat-tingkat atau hirarkis digolongkan menurut asosiasi superordinate.

b. Teori pluralistik model George Vold

George Vold mengemukakan bahwa: “masyarakat itu terdiri dari berbagai macam kelompok kepentingan yang harus bersaing, dan bahwa konflik merupakan salah satu unsurnya yang esensial/penting dengan kelompok-kelompok yang lebih kuat, mampu membuat negara merumuskan undang-undang/hukum demi kepentingan mereka”. Banyak tindakan kriminal merupakan tantangan oleh kelompok bawahan terhadap kelompok yang dominan, kendatipun ia nampaknya ingin membatasi uraian ini hingga ada isu-isu yang berkaitan dengan konflik ideologi politik, konflik batas udara, konflik hak-hak perdata dan sebagainya.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 63-66.

- c. Teori Austin Turk (kriminal terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kuat).

Turk adalah seorang tokoh penulis perspektif kriminologi konflik, mengetengahkan proporsi teori “hukum pidana yang ditetapkan kelompok-kelompok yang lebih kuat” sebagai berikut:

- a. Individu-individu yang berbeda dalam pengertian dan komitmen mereka
- b. Perbedaan tersebut mengakibatkan konflik.
- c. Masing-masing konflik yang berpihak (bersengketa) berusaha meningkatkan pandangan-pandangan sendiri.
- d. Mereka dengan kepercayaan yang sama cenderung bergabung dan membentuk komitmen serupa.

3. Teori Radikal (Kriminologi Kritis)

Pada dasarnya perspektif kriminologi yang mengetengahkan teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis. Dua teori radikal akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Richard Quinney.

Menurut Richard Quinney, beranggapan kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis” Quinney mengetengahkan proporsinya mengenai penanggulangan

kejahatan sebagai berikut :

- a. Masyarakat Amerika didasarkan pada ekonomi kapitalis yang telah maju.
- b. Negara diorganisir untuk melayani kepentingan kelas ekonomi yang dominan.
- c. Hukum pidana merupakan alat atau instrumen negara kelas penguasa untuk mempertahankan dan mengabadikan atau mengekalkan tertib sosial dan ekonomi yang ada.
- d. Kontrol kejahatan dalam masyarakat kapitalis dicapai melalui berbagai macam lembaga dan aparat yang didirikan dan diatur oleh golongan elite dalam pemerintahan, yang mewakili kepentingan kelas yang memerintah, dengan tujuan mendirikan tertib domestik.
- e. Kontradiksi-kontradiksi kapitalisme yang telah maju adalah terdapat rantai putus antara keberadaan dan kebutuhan inti, di mana kelas-kelas bawah tetap tertekan oleh apa saja yang dianggap perlu, khususnya melalui penggunaan paksaan atau kekerasan sistem perudang-udangan yang ada.
- f. Hanya melalui bubarnya atau ambruknya masyarakat kapitalis dan diciptakannya masyarakat baru yang

didasarkan pada azas sosialis baru bisa diperoleh pemecahan masalah kejahatan.

1. William Chamblis

Menurut Chamblis ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir di bawah ini:

- a. Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk.
- b. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami.
- c. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan.

Melalui pemahaman teori-teori tersebut di atas, baik refleksi kejahatan model konsensus maupun refleksi kejahatan model konflik memungkinkan dapat diikutinya pergeseran perspektifnya. Kepahaman ini akan bermanfaat bagi pemilihan perspektif kriminologi yang tepat bagi kebijakan kriminal dan kebijakan sosial di Indonesia.

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat, bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

D. *Cybercrime*

Seiring perkembangan teknologi informatika yang semakin canggih di era globalisasi, telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai jenis kejahatan yang sifatnya modern dan berdampak lebih besar dari kejahatan konvensional. Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white collar crime*³⁸ karena pelaku *cybercrime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet. beserta aplikasinya, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, sehingga harus diberantas.

Oleh karena itu, *cybercrime* atau kejahatan dunia maya dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan, karena *cybercrime* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu UU ITE

1. Pengertian *Cybercrime*

Kata *cyber* sendiri berasal dari kata *cybernetics*, merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan tentang mengatur atau mengarahkan sistem mulai dari yang sederhana hingga yang paling kompleks dengan cara

³⁸ Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hlm.1

memahami sistem dan perilakunya terlebih dahulu dan mengaturnya dari luar sistem melalui alat, cara dan metode.³⁹

Cybercrime saat ini digunakan untuk menunjukkan kepada kejahatan yang berhubungan dengan *cyberspace* dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer (*computer crime*). *Cyberspace*⁴⁰ merupakan ruang virtual yang terbentuk dari hasil penyatuan antara manusia dan teknologi. Perkembangan *cyberspace* yang pesat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan teknologi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyberspace* inilah yang kemudian dikenal dengan *cybercrime* atau dalam berbagai literatur lain digunakan istilah *computer crime* dan sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi kejahatan komputer.

Dalam berbagai kepustakaan, *cybercrime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*. Menurut the U.S Department of Justice, *computer crime* sebagai “Any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution.” Pendapat lain dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation Development* (OECD) yang menggunakan istilah *computer related crime*

³⁹Josua Sitompul, S.H., IMM, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 4.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 15.

yang berarti: “*any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data.*”⁴¹

Dari berbagai pengertian *computer crime* di atas, maka dapat dirumuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.⁴²

Menurut Nazura Abdul Manaf, perbedaan mendasar antara *cybercrime* dan *computer crime* adalah adanya unsur komputer yang terkoneksi melalui perangkat telekomunikasi dalam bentuk *internet online* yang menjadi media bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.⁴³

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para penegak hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari indentifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber/maya* melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar komponen *hardware*-nya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, tetapi sudah

⁴¹ Widyopramono Hadi Widjojo, 2005, “Cybercrimes dan Pencegahannya”, jurnal Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 7 dalam Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cybercrime Suatu Pengantar*”, Kencana, Jakarta hlm. 47

⁴² *Ibid.*, hlm.48

⁴³ *Ibid.*

dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh suatu sistem teknologi informasi yang bersangkutan Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi.⁴⁴

Secara umum, yang dimaksud kejahatan di dunia *cybercrime* (*cybercrime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁴⁵

Oleh karena itu, pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu sendiri serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to receipient*).

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:⁴⁶

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah *cybercrime/cyberspace*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan perbuatan apapun yang terhubung dengan internet.

⁴⁴ Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 10-11

⁴⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 8

⁴⁶ Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm.13-14

3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, uang, jasa, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

2. Bentuk-bentuk *Cybercrime*

Banyak perbedaan pendapat di antara para ahli dalam mengklasifikasikan kejahatan komputer. Ternyata dari klasifikasi tersebut terdapat beberapa kesamaan dalam beberapa hal sebagai berikut⁴⁷:

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer
2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau software komputer.
3. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
4. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.14

5. Tindakan yang merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

Sedangkan diliteratur lainnya mengelompokkan *cybercrime* menjadi beberapa bentuk, antara lain⁴⁸:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain,

⁴⁸ Maskun, *Op.Cit.*, hlm. 51-54

dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan *cyber* di atas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan dalam dua golongan (besar-pen): penipuan data dan penipuan program. Dalam bentuk *pertama*, data yang tidak sah dimasukkan ke dalam sistem atau jaringan komputer atau data yang tidak sah dan seharusnya di *entry* diubah sehingga menjadi tidak valid atau tidak sah lagi. Fokus perhatian pada kasus pertama ini adalah adanya pemalsuan dan/atau perusakan data input dengan maksud untuk mengubah output. Bentuk kejahatan yang *kedua*, yang relatif lebih canggih dan lebih berbahaya apabila seseorang mengubah program komputer baik dilakukan langsung di tempat komputer tersebut berada maupun dilakukan secara remote melalui jaringan komunikasi data. Pada kasus ini penjahat melakukan penetrasi ke dalam sistem komputer dan selanjutnya mengubah susunan program dengan tujuan menghasilkan keluaran yang berbeda dari seharusnya, meski program tersebut memperoleh masukan yang benar.⁴⁹

3. Ketentuan Hukum Dalam *Cybercrime*

Sebagai langkah preventif terhadap segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang komputer khususnya *cyber*, sedapat mungkin dikembalikan pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan peraturan di luar KUHP. Pengintegrasian dalam peraturan yang sudah ada berarti

⁴⁹ Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm.16-17.

melakukan suatu penghematan dan mencegah timbulnya *over criminalization*⁵⁰, tanpa mengubah asas-asas yang berlaku dan tidak menimbulkan akibat-akibat sampingan yang dapat mengganggu perkembangan teknologi informasi.

Ada beberapa hukum positif yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *cybercrime* terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana sebelum hadirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain⁵¹:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus *carding* dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit nasabah dengan menggunakan *software* tertentu dan melakukan transaksi.
2. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan. Hal ini lah yang paling sering terjadi dalam melakukan transaksi online. Berbagai jenis penawaran atau iklan yang ditawarkan sehingga menarik pembeli menggunakan uangnya dan ketika pembeli telah mentransfer uang ternyata barang yang diinginkan tidak terkirim sehingga pembeli merasa tertipu.

⁵⁰ Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 13

⁵¹ Pujiyono, Makalah: "Eksistensi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia, hlm. 13-15 dalam pustaka [uns.ac.id/ download/Dr .%20Pujiyono,%20SH,%20 MH.docx](http://uns.ac.id/download/Dr.%20Pujiyono,%20SH,%20MH.docx) diakses pada 13 Oktober 2014

3. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail* yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
4. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.
5. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara *online* di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
6. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
7. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
8. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.

2) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Menurut Pasal 1 angka (8) Undang – Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang intruksi-intruksi tersebut.

3) Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No 36 Tahun 1999:

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

4) Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan. Misalnya Compact Disk – Read Only Memory (CD – ROM), dan Write – Once - Read – Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah.

5) Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Khususnya Pasal 2 Ayat 1 q, menjelaskan bahwa salah satu jenis tindak pidana penipuan adalah dilakukan melalui internet dan Pasal 38 huruf b menjelaskan bahwa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, dan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu adalah merupakan alat bukti yang sah.

6) Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme. Karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap Internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah *e-mail* dan *chatroom* selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui *bulletin board* atau *mailing list*.

7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

Khususnya Pasal 29, mengatur alat bukti selain sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yaitu yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan dapat dikeluarkan dengan atau tanpa

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dikertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik

Kemudian diatur dalam UU ITE dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 mengenai perbuatan yang dilarang dan Pasal 45 sampai Pasal 52 mengenai ketentuan pidana, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008 sebagai hukum positif yang berlaku saat ini (*lex specialis*), diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.

Unsur objektif dalam hal perumusan delik *cybercrime* mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab dengan cara ini ditempuh banyak hal yang akan lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, pelakunya harus dikualifikasikan secara nyata.⁵²

Semua kejahatan pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan tertentu dikatakan jahat, karena seseorang dianggap telah menjadi

⁵² Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm.153-154

korban, termasuk tentunya korban kejahatan *cyber* yang meliputi orang-perorangan, kelompok orang atau badan yang telah menderita atau korban akibat dari kegiatan ilegal. Kerugian itu bisa secara fisik, psikologis atau ekonomi.

Pada kenyataan yang ada, tidak terlihat secara nyata korban dari kejahatan *cyber* bila dibandingkan dengan korban kejahatan konvensional. Hal ini dikarenakan korban kejahatan *cyber* lebih bersifat luas (global) sehingga jumlahnya lebih besar, juga dampak yang ditimbulkan. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, khususnya dalam praktik penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut⁵³, karena pada dasarnya teknologi informasi diperuntukkan sebagai penunjang aktivitas manusia dengan memberikan kemudahan, bukan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil.

⁵³ *Ibid.*, hlm.153.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya didalam wilayah hukum Polres Makassar. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini Penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi, yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan korban terhadap terjadinya *cybercrime* dan upaya penanggulannya.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah :

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini,
- 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

C. Jenis Penelitian Data

Jenis penelitian data yang digunakan Penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu:

- 1) *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan Penulis melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (polisi) dan kepada masyarakat yang menjadi korban.
- 2) *Library research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahasa pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna

memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Korban Terhadap Tindak Pidana *Cybercrime* di Kota Makassar.

1. Perkembangan Tindak Pidana *Cybercrime* di Kota Makassar

Tindak pidana *cybercrime* merupakan permasalahan yang berkembang di dunia modern. Semakin modern kehidupan masyarakatnya maka semakin beragam dan modern juga modus kejahatannya. Masyarakat modern umumnya merupakan masyarakat perkotaan yang berorientasi dengan perkembangan zaman masa kini terutama dalam hal pengetahuan dan teknologi, tidak terkecuali kota besar seperti Kota Makassar.

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana *Cybercrime* adalah kemajuan teknologi itu sendiri yang penggunaannya semakin hari semakin bertambah namun tidak diiringi dengan pengetahuan penggunaannya. *Cybercrime* adalah kejahatan konvensional teknologi informasi yang terjadi di ruang virtual atau maya yang dapat meresahkan penggunaannya, kerugian yang diakibatkan *cybercrime* dapat berupa materiil yang tidak sedikit dan imateriil yang kemudian berdampak secara psikologi terhadap korban.

Berdasarkan uraian diatas, kemudian Penulis menunjukkan jumlah tindak pidana *cybercrime* yang terjadi di Kota Makassar dalam bentuk

tabel berdasarkan data laporan masuk kepada pihak Polrestabes Makassar dari tahun 2012-2014:

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana *Cybercrime* yang Dilaporkan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2012-2014

No.	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2012	2	14,28%
2	2013	3	21,42%
3	2014	9	64,3%
Jumlah		14	100%

Sumber: Polrestabes Makassar, 2015

Secara umum dapat dilihat dari tabel di atas jumlah perkara tindak pidana *cybercrime* yang dilaporkan di kota Makassar mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 9 kasus (64,3%). Menurut Kasubnit 1 Idik III, M.W Hanawiya, SH (27 Januari 2015), peningkatan tersebut disebabkan karena sudah banyak masyarakat yang telah menggunakan media elektronik dan juga didukung dengan harga yang relatif terjangkau, akan tetapi hal tersebut disalahgunakan. Dalam 3 tahun terakhir tercatat telah terjadi 14 kasus *cybercrime* yang dilaporkan, jumlah tersebut masih relatif rendah peningkatan pertahunnya. namun, jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun-tahun selanjutnya seiring semakin majunya teknologi, seperti pada tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara korban dan

pihak-pihak terkait sehingga kejahatan ini terus berkurang dan menciptakan rasa aman dan nyaman saat menggunakan media informasi elektronik.

Sementara itu, Penulis juga mendapatkan data laporan masyarakat khusus wilayah kota Makassar kepada Polda Sulselbar yang memiliki unit khusus menangani kasus *cybercrime* dimana penulis melakukan penelitian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Jumlah Tindak Pidana *Cybercrime* yang terjadi di Kota Makassar yang Dilaporkan di Wilayah Hukum Polda Sulselbar Ditreskrimsus *Cybercrime* Tahun 2012-2014

No.	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2012	10	15,87%
2	2013	29	46,03%
3	2014	24	38,1%
Jumlah		63	100%

Sumber: Polda Sulselbar Ditreskrimsus *Cybercrime*, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 terjadi peningkatan kasus *cybercrime* sebanyak 29 kasus (46,03%) dan merupakan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir, sementara pada tahun 2012 terdapat 10 kasus (15,87%) yang berarti terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat dan pada tahun 2014 terlihat tidak berbeda jauh dari tahun 2013 yaitu sebanyak 24 kasus (38,1%). Jadi, jumlah kasus yang ditangani oleh Polda Sulselbar Ditreskrimsus *Cybercrime* khusus Kota Makassar yaitu sebanyak 63 kasus.

Modus dari tindak pidana *cybercrime* semakin hari semakin beragam dan canggih sehingga kejahatan ini juga ikut berkembang.

Menurut hasil wawancara dengan Kompol M.T Palebang selaku Kanit 4 Subdit 2 *Cybercrime* (24 Januari 2015), tindak pidana terbanyak yang dilaporkan oleh korban adalah mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal senada juga disampaikan oleh M.W Hanawiyah, SH yang menyebutkan bahwa 3 tahun terakhir dari laporan masyarakat yang diterima terkait *cybercrime*, penghinaan dan pencemaran nama baik menempati posisi pertama dengan persentase 65%, lalu diikuti dengan penipuan sebesar 30% dan sisanya terdapat kasus lain seperti perjudian melalui internet, pemerasan, penyebaran gambar porno, peretasan atau *hacking* sebesar 5%.

Penghinaan dan pencemaran nama baik menempati posisi teratas dalam bentuk kejahatan *cyber*. Kebebasan berpendapat atau mengkritisi suatu permasalahan jika tidak diutarakan dengan baik dapat menjadi pemicu pelanggaran pidana jenis ini. Batasan antara berpendapat atau mengkritisi suatu masalah dengan melakukan penghinaan dewasa ini sangat tipis perbedaan diantara keduanya. Penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan delik aduan mutlak, karena ketika kritik atau pendapat tersebut menyinggung pihak yang merasa dirugikan dan dilaporkan barulah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana dan menjadi mutlak karena yang dilaporkan dan dituntut adalah perbuatannya.

Bentuk-bentuk kejahatan pada tabel 3 merupakan tindak pidana *cybercrime* dalam bentuk *Illegal Contents*, *Unauthorized Access to Computer System and Service* dan *Infringement of Privacy*.

Unauthorized Access to Computer System and Service yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya atau biasa kita kenal dengan istilah *hacking*. Pelaku meretas akun korban dengan memasuki sistem jaringan dengan menggunakan bahasa pemograman tertentu untuk mencuri data yang tersimpan dalam tempat penyimpanan korban. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai *hacking* ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) UU ITE.

Illegal Contents Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Bentuk tindak pidana *cybercrime* jenis ini tergolong pada situs bermuatan negatif, termasuk pula dalam kasus penipuan yang memuat hal tidak benar serta penghinaan dan pencemaran nama baik yang berisikan perkataan yang kasar dan tidak etis. Ketentuan mengenai penipuan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) untuk penipuan dan Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik UU ITE.

Infringements of Privacy adalah kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan

rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit atau yang biasa dikenal dengan istilah *carding*. Untuk kasus *carding* dapat diancam dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE.

2. Peran Korban Dalam Tindak Pidana *Cybercrime* di Kota Makassar

Viktimologis menganalisis mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, bagaimana seseorang tersebut dapat menjadi korban dari suatu kejahatan dengan kata lain merujuk kepada peran korban dalam terjadinya kejahatan, salah satunya adalah *cybercrime*. Korban tindak pidana *cybercrime* ini tidak hanya menyerang individu ataupun kelompok masyarakat tetapi juga dapat menyerang badan usaha. Peran korban dalam kejahatan *cybercrime* juga beragam mengikut jenis tindak pidana *cybercrime* yang dilakukan oleh pelaku. Menurut klasifikasi atau tipologi korban, korban tindak pidana *cybercrime* termasuk dalam tipe *participating victim*.

Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. Menurut hasil wawancara dengan M.W Hanawiyah, SH, menjelaskan mengenai peranan korban dalam terjadinya *cybercrime*, dimana hubungan antara teman, keluarga ataupun relasi dengan persentase sebesar 50%

menempati urutan pertama, kemudian mengenai pengetahuan rendah dari pengguna media informasi elektronik yaitu sebesar 40% diurutan kedua dan faktor ketiga yaitu kelalaian korban dengan persentase sebesar 10%. Penulis kemudian menuangkan hasil wawancara tersebut ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Peranan Korban Terhadap Tindak Pidana *Cybercrime* yang Terjadi di Kota Makassar Tahun 2012-2014

No.	Peranan Korban Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	Persentase
1	Hubungan Keluarga/ Teman/Relasi	50%
2	Pengetahuan Rendah	40%
3	Kelalaian	10%
Jumlah		100%

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Responden, 2015

M.W Hanawiyah, SH menjelaskan lebih rinci mengenai faktor pertama yaitu hubungan antara keluarga, teman ataupun relasi. Hal ini menjadi penyebab utama dikarenakan korban memiliki masalah sebelumnya dengan lingkungan sosialnya, sehingga dapat memicu amarah ataupun kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Tidak hanya itu saja, lebih lanjut menurut Kopol M.T Palebang hubungan dengan relasi yang tidak harmonis atau melakukan hal yang tidak disukai oleh pelaku serta adanya persaingan baik di bidang politik ataupun sosial diantara kedua belah yang berujung dengan saling menjatuhkan pihak lawan. Di

antara korban yang menjadi korban penghinaan akibat hubungan yang tidak harmonis paling banyak dialami oleh masyarakat biasa dan pelakunya masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Seorang korban bernama Mega (mahasiswi, 1 tahun) berdasarkan wawancara (04 Maret 2015) menerangkan bahwa dirinya pernah menjadi korban pencemaran nama baik di media sosial. Pelaku memasukkan foto korban ke salah satu media sosial dan meminta pendapat dari pengguna lainnya mengenai diri korban di media sosial tersebut. Diantara komentar yang masuk, hanya pelaku lah yang menuliskan kata-kata tidak pantas dan melecehkan korban. Tidak hanya sampai disitu saja korban juga terkadang menerima pesan yang sama dan terkesan mengancam. Korban mengetahui bahwa fotonya menjadi bulan-bulanan pelaku dari temannya yang mengenal foto dirinya. Korban tidak mengetahui siapa yang mengunggah foto tersebut, ia merasa dirinya tidak pernah bermasalah dengan siapapun.

Faktor yang kedua yaitu mengenai pengetahuan akan teknologi informasi yang digunakan oleh penggunanya. Menurut Kopol M.T Palebang, teknologi yang semakin berkembang tidak diimbangi dengan pengetahuan penggunanya, faktor ini biasanya terkait dengan penipuan. Korban yang tujuan awalnya mencari kebutuhannya kemudian tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan tetapi tidak mengetahui apakah barang ditawarkan itu ada atau tidak, legal atau ilegal atau situs yang digunakan bersifat asli atau palsu. Pelaku melihat kesempatan yang

diberikan korban yang mulai tertarik dengan barang yang ditawarkan, mengingat bahwa kegiatan jual beli barang atau jasa di internet antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu secara langsung. M.W Hanawiyah, SH memberikan penjelasan yang senada, bahwa ketika melakukan pembelian secara *online* kebanyakan pembeli tidak mengetahui bagaimana cara aman untuk melakukan transaksi secara aman dan rahasia, seperti memasukkan nomor kartu kredit pada situs yang belum diketahui keasliannya sehingga nomor kartu kredit bisa tersalin ke suatu sistem yang disiapkan oleh pelaku kejahatan.

Berkaitan dengan faktor yang kedua, penulis kemudian melakukan wawancara (6 Februari 2015) dengan seseorang yang pernah menjadi korban yaitu Marina (Mahasiswi, 20 tahun). Marina kemudian menceritakan bahwa ia pernah menjadi korban penipuan di internet. Kasusnya bermula korban hendak membeli sebuah sepeda motor, kemudian korban membuka salah satu situs belanja *online* dan mendapati iklan penjualan motor dengan harga murah.

Korban kemudian tertarik dan menyepakati harga, proses pengiriman dan pembayaran barang. Pelaku kemudian menyuruh korban untuk membayar uang muka. Setelah korban membayar, pelaku berjanji akan memberikan nomor resi pengiriman kepada korban. Namun, berselang beberapa hari nomor resi pun belum diberikan dan korban diminta untuk melunasi sisa harga sepeda motor tersebut setelah itu baru akan diberikan nomor resi pengiriman barang. Setelah korban

mentransfer, korban mempertanyakan kembali nomor resi dan diberikan nomor resi tersebut. Setelah mencari ke perusahaan pengiriman tersebut nomor resi yang diberikan tidak ditemukan dan korban menghubungi pelaku kembali dan menanyakan hal tersebut, pelaku menjawab sudah mengirim barang tersebut dan meminta korban untuk menghubungi rekan pelaku lainnya yang mengaku dari perusahaan pengiriman tersebut. Setelah menghubungi orang tersebut kemudian pelaku yang mengaku dari bagian pengiriman meminta korban untuk mentransfer kembali sejumlah uang jika barangnya ingin dikirimkan. Namun korban menolak dengan alasan bahwa korban sudah tidak mempunyai uang lagi untuk diberikan kepada pelaku. Alhasil dari kasus tersebut korban mengalami kerugian mencapai 7 (tujuh) juta rupiah.

Faktor ketiga yaitu kelalaian, menurut Kompol M.T Palebang hal ini juga berkaitan dengan faktor sebelumnya. Korban terkadang lalai karna tidak mengetahui perbuatannya, seperti meninggalkan akun pribadinya dan tidak menutupnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga sewaktu-waktu orang lain bisa menggunakan akun tersebut untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut beliau mengatakan, hal seperti ini juga bisa terjadi ketika telepon genggam atau laptop korban dicuri lalu data yang tersimpan kemudian digunakan untuk berbuat kejahatan atau biasa disebut dengan *carding*.

M.W Hanawiyah, SH kemudian mengatakan bahwa kelalaian dapat membuka kesempatan yang besar kepada pelaku untuk melakukan

kejahatan dan merugikan korban. Jika korban lalai pada kasus-kasus seperti *hacking*, membiarkan sistem terbuka dan tidak dengan segera mengamankan data pelaku dapat dengan cepat mengambil ataupun merubah sistem, karna pelaku dapat melihat kelemahan dari sistem keamanan yang dibangun atau dibuat oleh korban.

Penulis kemudian melakukan wawancara (6 Februari 2015) dengan salah satu korban yang pernah mengalami hal tersebut, yaitu Arivin (Karyawan, 34 tahun) yang menjadi korban *carding*. Korban memiliki saldo sebesar 1,5 juta rupiah pada akun sebuah situs permainan *online* dimana situs tersebut selain digunakan sebagai server bermain *online* juga merupakan tempat jual beli game yang juga dilengkapi dengan sistem percakapan sesama penggunanya. Salah satu penggunanya kemudian meminta korban untuk membuka sebuah alamat situs untuk mengecek katalog *game*. Korban akhirnya membuka situs tersebut yang ternyata sebuah jebakan *carding*. Korban tidak mengetahui dan memeriksa apakah orang yang memberikannya alamat situs tersebut berasal dari perusahaan permainan tersebut yang menyediakan katalog *game*, korban mengatakan kalau dia hanya asal klik saja. Akibatnya, korban tidak dapat lagi masuk ke dalam akunnya dan saldo yang terdapat dalam akun tersebut juga tidak dapat diambil kembali.

Berdasarkan wawancara (6 Februari 2015) kasus yang hampir serupa terjadi pada korban bernama Suardi (karyawan, 35 tahun) yang memiliki akun *facebook*. Namun modusnya berbeda. Pelaku meretas

(*hacking*) akun *facebook* korban kemudian berpura-pura menjadi korban dan meminta pulsa kepada teman-teman korban. Korban menceritakan bahwa beberapa teman korban sudah mengirimkan sejumlah pulsa ke nomor yang diberikan. Kemudian salah satu teman korban memberi tahu korban ditempat kerja untuk kembali mengkonfirmasi apakah pulsa yang dikirimkan oleh teman korban telah masuk, korban merasa tidak pernah meminta pulsa kepada teman-temannya. Namun, teman korban memperlihatkan nomor telfon tersebut dan percakapan di akun *facebook* tersebut. Korban yang merasa tidak pernah meminta pulsa dan mengakui bahwa korban tidak lagi dapat mengakses akun facebook-nya tersebut kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan korban tindak pidana *cybercrime*, banyak dari mereka mengatakan kalau kasusnya tidak dapat dilanjutkan hal ini dikarenakan kekurangan alat bukti dan pelakunya pun tidak dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib. Berkaitan dengan hal tersebut, Kopol M.T Palebang membenarkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pengungkapan kasus tersebut. Seperti misalnya, pelaku menghilangkan alat bukti berupa *simcard* yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Hal ini memberatkan penyidikan untuk mengunkpa keberadaan dari pelaku, bisa jadi pelaku berada hari ini di kota A dan berikutnya terlacak di kota B dan juga pihak dari kejaksaan tidak menerima jika alat bukti belum lengkap. Tempat kejahatan atau *locus delicti* untuk kejahatan ini bersifat maya, berada di sebuah ruang

virtual yang sangat sulit untuk menemukan barang bukti jika dihilangkan oleh pelaku. Alat yang digunakan pun masih sangat terbatas penggunaannya dan jumlahnya sangat sedikit serta mengingat kasus seperti ini bisa terjadi dimana saja (transnasional) jadi butuh koordinasi terlebih dahulu dengan daerah dimana pelaku terakhir berada.

Fakta lain yang ditemukan setelah penulis melakukan wawancara adalah banyak dari korban tindak pidana *cybercrime* tidak melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib dan merelakan kejadiannya berlalu begitu saja dengan lebih berhati-hati untuk selanjutnya atau menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti menemui langsung pelaku dan meminta pertanggungjawabannya. Para korban beranggapan bahwa polisi tidak akan bisa menangkap pelakunya, dikarenakan korban mengetahui teknologi yang dimiliki oleh kepolisian belum memadai dan membuang waktu.

B. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi Adanya Korban Tindak Pidana *Cybercrime*

Dalam menanggulangi tindak pidana *cybercrime* yang mulai marak di Kota Makassar, pihak kepolisian melakukan upaya penanggulangan baik melalui upaya preventif dan represif.

Upaya preventif adalah salah satu upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana dengan mencegah perbuatan jahat seseorang untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana

(non-penal). Penanggulangan melalui upaya preventif bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang guna menciptakan suasana yang kondusif untuk menekan terjadinya tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana *cybercrime*.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya-upaya yang dilakukan pihak polrestabes Makassar dan Polda Sulselbar Ditreskrimsus *Cybercrime* melalui M.W Hanawiyah, SH dan Kompol M.T Palebang antara lain :

- Melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap memiliki konten yang melanggar ketertiban dan kesusilaan, terdapat unsur teror yang meresahkan masyarakat, mengandung unsur tindak pidana atau dianggap merugikan masyarakat dengan kata lain mengandung konten bermuatan negatif yang bertentangan dengan perundang-undangan di Indonesia dengan berkoordinasi dengan pemerintah dan dalam hal ini juga diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pemblokiran situs tertentu.
- Melalui kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah untuk dan pihak terkait lainnya dalam rangka penegakan undang-undang yang dilakukan dengan sistematis dan terarah.
- Melalui sosialisasi ataupun penghimbau kepada masyarakat melalui media cetak ataupun elektronik dalam bentuk bimbingan, pengarahan dan ajakan dari orang yang tidak dikenal, tidak mudah terpancing dengan barang murah yang

dijual di internet dan juga agar lebih berhati-hati untuk menuliskan kritik ataupun bertutur kata di media sosial.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berhati-hati. Upaya preventif diatas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa siapa saja dapat menjadi korban tindak pidana *cybercrime* dan melalui sosialisasi pihak kepolisian menjelaskan mengenai sanksi tegas yang dapat diberikan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana *cybercrime*.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Lembaga Penegak Hukum dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif kepada Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika. Jadi menurut penulis, langkah yang digunakan oleh pihak kepolisian sudah tepat tetapi perlu diperhatikan apakah pemblokiran sudah tepat sasaran atau belum.

Penanggulangan tindak pidana *cybercrime* lainnya yaitu melalui upaya represif. Upaya represif atau sering disebut dengan penal yang dilakukan dengan menjatuhkan pidana guna menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Upaya represif diterapkan setelah terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol M.T Palebang upaya penanggulangan secara represif terus dioptimalkan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana yang dilaporkan ke pihak

kepolisian. Setelah laporan diterima kemudian melakukan penyelidikan, setelah itu diserahkan kepada penyidik untuk mulai mengumpulkan bukti-bukti hingga berkas dapat dilimpahkan ke Kejaksaan.

Selanjutnya Kopol M.T Palebang mengatakan bahwa diharapkan dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan disertai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku *cybercrime*. Polrestabes dan polsek di wilayah Kota Makassar juga dikerahkan ke garda terdepan dalam upaya menanggulangi kejahatan.

Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan, tertuma dalam mengumpulkan bukti-bukti. Masyarakat diminta untuk sesegera mungkin melaporkan dan menyimpan seluruh rekaman atau data yang dapat mendukung kasus tersebut. Kopol M.T Palebang juga menjelaskan bahwa *cybercrime* merupakan kejahatan yang teroganisir karena jika dilihat dari latar belakang pendidikan tidak sebanding dengan keahliannya, sebelumnya para pelaku merupakan orang suruhan dari atasan mereka yang kemudian pelaku mempelajari apa yang telah didapatkan dari pengalaman bekerja dengan atasan mereka.

Kendala dalam mengungkap kasus *cybercrime* ini telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis yaitu mengenai keterbatasan alat yang dimiliki oleh pihak kepolisian, penghilangan barang bukti oleh pelaku, dan mengingat bahwa kasus *cybercrime* memiliki cakupan wilayah yang sangat luas tidak hanya antar provinsi di Indonesia tetapi juga lintas

negara. Beberapa kendala tersebut di atas dapat mengurangi keefektifan gerak dan kegiatan pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan *cybercrime*, oleh karena itu pemenuhan atas kendala di atas dapat segera teratasi seperti koordinasi yang cepat dan terarah, pemenuhan alat-alat yang mendukung untuk melacak pelaku dan alat yang dapat mengembalikan kembali data yang hilang. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua lembaga tersebut, penulis juga mendapatkan fakta bahwa tidak lebih dari 10 kasus sepanjang 2012-2014 yang berhasil diputus di Pengadilan Negeri Makassar.

Untuk itu peran aktif masing-masing pihak sangat diperlukan dalam menanggulangi tindak pidana *cybercrime* dan pihak yang diberi tanggungjawab dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara optimal dan diatasi dengan baik.

Cybercrime merupakan kejahatan yang terjadi di wilayah maya atau virtual. Namun perlu diingat bahwa masyarakat yang berada di wilayah maya atau virtual tersebut adalah masyarakat nyata yang perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus oleh aparat penegak hukum. Penanggulangan merupakan langkah yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana atau mengurangi angka kejahatan. Aparat penegak hukum juga berkewajiban untuk melindungi kepentingan korban *cybercrime* dan mengingatkan korban akan perannya yang dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan

kejahatan. Kerugian yang dialami korban *cybercrime* tidak hanya rugi secara materiil tetapi juga langsung kepada kondisi kejiwaan seseorang.

Setiap perbuatan pidana memiliki sanksi tegas yang telah diatur sebelumnya. Diharapkan dengan tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan jahat atau dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Pelaku pada kasus *hacking* misalnya, setelah mendapat sanksi dapat juga diberi pengarahan berdasarkan kemampuannya untuk membantu pihak kepolisian mengungkap berbagai kasus yang berkaitan dengan *cybercrime* sehingga dapat memperbaiki kualitas hidupnya dan tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga peran masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dapat berjalan sesuai tanggung jawabnya dan dijalankan berdasarkan rasa keadilan dan sebaik-baiknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana *cybercrime* di Kota Makassar adalah faktor hubungan korban dengan teman/keluarga/relasi yang tidak harmonis dan terdapat hal-hal yang pernah dilakukan oleh korban yang kemudian tidak disukai oleh pelaku serta kurangnya pengetahuan yang dimiliki korban untuk menghindari kejahatan *cybercrime*. Kurangnya pengetahuan mengenai cara mengamankan akun di media sosial dan bertransaksi secara aman dan nyaman melalui internet.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kota Makassar dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui upaya preventif (pencegahan) dengan cara sosialisasi dan pemblokiran situs yang dianggap memiliki muatan yang dilarang oleh undang-undang serta dengan upaya represif (penal). Namun dari kedua upaya yang dilakukan pihak kepolisian, belum dapat mengurangi kasus *cybercrime* yang setiap tahun mengalami peningkatan. Upaya represif dengan menindaklanjuti setiap kasus yang dilaporkan belum dapat dioptimalkan karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut antara lain, kurangnya

alat penunjang yang dimiliki oleh kepolisian dan pelaku yang kerap menghilangkan barang bukti.

B. Saran

1. Tindak pidana *cybercrime* perlu menjadi perhatian kita semua. Unit khusus yang dibentuk oleh kepolisian sebaiknya tidak hanya melakukan sosialisasi, pemblokiran terhadap situs yang diduga memuat unsur kejahatan ataupun menindaklanjuti ketika ada laporan, tetapi sebaiknya menerapkan polisi *cyber* yang dapat mengawasi pengunjung ataupun pengguna media elektronik. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mencegah dan mengungkap tindak pidana dengan modus beragam seperti ini untuk menghindari adanya korban akibat tindak pidana *cybercrime*.
2. Setiap orang, baik pengguna media informasi dan transaksi elektronik untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap seluruh modus tindak pidana *cybercrime* yang semakin canggih. Setiap orang yang bertransaksi melalui internet diharapkan agar mengenali dulu situs, dengan siapa bertransaksi dan dengan tidak memberikan kode sandi ataupun membuka *link* yang tidak dikenali, serta menjalin hubungan baik dengan teman/keluarga/relasi serta lebih berhati-hati bertutur atau menyampaikan kritik di media sosial.

3. Alat yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus *cybercrime* masih sangat terbatas jumlah dan penggunaannya ini perlu dioptimalkan baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus *cybercrime*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books: Makassar.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta (Kriminologi)*. Eresco Bandung: Bandung.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Akademika Pressindo: Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2003. *Kapita Setekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djamban: Denpasar.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Maskun, 2013. *Cybercrime Cybercrime Suatu Pengantar*". Kencana: Jakarta.
- Reksodiputro, Marjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum: Jakarta.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cynercrimes, Cyberlaws : Tinjauan Hukum Pidana*. PT Tatanusa: Jakarta.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya*, Politeia: Bogor

Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers: Jakarta.

Wede, Made Darma. 1995. *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco: Bandung

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

http://library.unej.ac.id/client/en_US/default/search/asset/632?dt=list
M. Arief Amrullah, Makalah: "Perkembangan Studi Tentang Korban dan Kedudukannya Dalam Hukum Pidana Positif", hlm. 4 diakses pada 11 Oktober 2014

<http://pustaka.uns.ac.id/download/Dr.%20Pujiyono,%20SH,%20MH.docx>
Pujiyono, Makalah: "Eksistensi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia, hlm. 13-15 diakses pada 13 Oktober 2014

<https://ml.scribd.com/doc/102079534/VIKTIMOLOGI>
Muladi, Makalah: "HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana", dalam: Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 109 diakses pada 13 Oktober 2014

<http://www.merdeka.com/peristiwa/hasil-riset-tahun-2013-indonesia-target-utama-kejahatan-cyber.html> diakses pada 17 Oktober 2014
<http://beritakotaonline.com/5265/lagi-polisi-ungkap-kasus-cyber-crime-di-makassar/> diakses pada 21 Oktober 2014